

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru

Muhammad Aldi Putra<sup>1</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup> dan Aunnurrafiq<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

E-mail : [taufentaufik94962@gmail.com](mailto:taufentaufik94962@gmail.com), [05aldiputra@gmail.com](mailto:05aldiputra@gmail.com)

### Article Informations

Received:  
(06-08-2023)

Accepted  
(19-09-2023)

Available Online :  
(01-02-2024)

### Keywords

Competence of Human Resources;  
Performance  
Accountability of Government Agencies;  
Regulatory  
Compliance; Role of Government Oversight  
Internal Apparatus.

### Abstract.

The title of this research is "Factors that Influence the Performance Accountability of Pekanbaru City Government Agencies". The phenomenon that occurs is that the SAKIP assessment target is still not achieved because the effectiveness and efficiency of budget use is still low when compared with its performance. This research was conducted because the performance achievement target planned by the Pekanbaru city government was still far away. The purpose of this study was to determine the effect of human resource competence, the role of internal government supervisors, and compliance with regulations on performance accountability of government agencies. This research uses descriptive statistical analysis, data quality tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis. The results of this study are the competence of human resources, the role of internal government supervisors, and compliance with regulations affect the performance accountability of government agencies.

## Pendahuluan

Lembaga pemerintahan diharuskan mempunyai sifat transparansi dalam menyampaikan tujuan maupun tugas pokoknya, karena keterbukaan informasi mempunyai andil besar dalam menentukan berhasil tidaknya suatu instansi mencapai visi misinya. Selain itu, lembaga pemerintahan dituntut untuk menjalankan aktivitas pemerintahan yang jauh dari unsur nepotisme, kolusi, dan korupsi baik di lembaga pemerintahan daerah maupun pusat, dimana hal ini berkaitan dengan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan yang dimaksudkan untuk mencapai good governance. disamping itu, lembaga pemerintahan menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya memperbaiki sistem maupun tata kelola manajemen pemerintahan. Fokus utama dalam sistem manajemen ini yakni orientasi hasil (outcome) melalui peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Maka dari itu, lembaga pemerintahan menerapkan SAKIP "(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)" untuk mencapai keefektifan, keteraturan, dan kejelasan dalam penerapan sistem tanggung jawab dalam instansi pemerintahan.

Tingkat akuntabilitas kinerja suatu lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pada riset ini faktor pertama yang akan dikaji pengaruhnya yakni sumber daya manusia. Adapun sumber daya manusia memiliki definisi yakni tingkat kompetensi, kemahiran, wawasan,

maupun experience dalam diri seorang individu yang kaitannya dengan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan efisien dan efektif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirawan (2009). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Disamping itu, diperlukan manajemen anggaran yang baik agar sistem pembangunan yang diinginkan tercapai. Berdasarkan hasil riset Eka Sari, (2017) ditemukan adanya tingkat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh sumber daya manusiaya. Akan tetapi pernyataan ini ditentang oleh hasil riset Nurkhasanah, (2019), dimana pada risetnya ditemukan tingkat akuntabilitas tidak dipengaruhi oleh SDM.

Kemudian faktor yang kedua yakni peran pengawas pemerintahan atau disebut dengan "APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)". Definisi dari pengawasan internal berdasarkan "Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, yakni aktivitas yang berhubungan dengan tahap mengevaluasi, memantau, mereview, mengaudit, dan mengawasi perihal konsultasi, sosialisasi maupun asistensi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas instansi untuk meyakinkan bahwa program yang diadakan memenuhi standar dan memiliki keefisienan maupun keefektifan dalam mencapai lembaga pemerintahan yang baik. Kemudian peranan APIP dalam lembaga pemerintahan yakni berperan sebagai pihak "auditor internal". Menurut hasil riset (Arifianti et al., 2013) adanya pengawas dari BPK maupun masyarakat bisa meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan maupun pertanggung jawaban keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah adalah ketaatan peraturan. Definisi ketaatan peraturan berdasarkan pendapat (Bastian, 2010), yakni sikap patuh dan taat seorang individu terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang tujuannya untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, dimana peraturan tersebut mempunyai sifat memaksa dan harus dijalankan oleh setiap penduduk. Karena ketercapaian akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan salah satunya dipengaruhi oleh sikap taat terhadap peraturan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, untuk menghasilkan laporan akuntabilitas yang sesuai dan bisa memenuhi kewajiban pemenuhan informasi publik maupun kepada pemerintahan pusat. Akan tetapi, lembaga pemerintahan daerah enggan untuk mengimplementasikan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil riset (Soleman, 2007) membahas terkait sikap taat pada peraturan undang-undang dan pengaruhnya dengan tingkat akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan non-pemekaran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara ditemukan adanya "akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dipengaruhi oleh ketaatan pada peraturan perundangan".

Hasil riset terdahulu yang mengangkat topik serupa yakni (Mubaraq, 2017). Hal yang membedakan riset terdahulu dengan yang peneliti lakukan yakni waktu dan objek penelitian serta kasus yang terjadi di pemerintah Kota Pekanbaru. Seiring banyaknya kasus yang bermunculan menarik peneliti untuk melakukan observasi di lembaga pemerintahan daerah dengan fokusnya yakni pemerintahan kota Pekanbaru. Kemudian topik yang diangkat yakni "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran APIP, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Pekanbaru)".

"Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"; salah satu karakter yang berkaitan dengan kompetensi SDM yakni sikap profesionalitas. Profesionalitas merupakan perwujudan dari adanya kecakapan SDM didalam sebuah organisasi. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh (Fardian, 2014) keoptimalan kinerja suatu aktivitas

operasional instansi maupun organisasi tergantung dari kualitas SDM-nya, dimana SDM yang semakin kompeten akan menjadikan instansi tersebut mampu bersaing dengan instansi kompetitor dan hasil kerja yang diperoleh lebih optimal. Kondisi ini mengindikasikan tingkat akuntabilitas organisasi perangkat daerah yang semakin baik seiring dengan tingginya kompetensi SDM. Beberapa aspek yang mengindikasikan tingkat SDM-nya tinggi yakni jabatan, wewenang, riwayat pendidikan, experience, dan program pelatihan.

"Pengaruh Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"; Suatu lembaga pemerintahan yang tugasnya mengawasi program internal pemerintahan daerah maupun pusat disebut dengan APIP. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh (Mikesell, 2007) adanya pengawasan intern ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pengawasan kemungkinan adanya penyelewengan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bisa berbentuk praktik ilegal yang bisa menurunkan keefektifan, keefisienan, dan keteraturan pelaksanaan program serta menentukan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki penyimpangan akuntabilitas agar tidak membawa kerugian besar. Kemudian tugas dari inspektorat daerah berdasarkan "Permendagri No. 64 tahun 2007" yakni mengawasi tata laksana program dan kinerja lembaga pemerintahan daerah, tujuannya mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Sehingga baik buruknya kinerja lembaga pemerintahan salah satunya dipengaruhi oleh peranan inspektorat. Maka APIP diberikan kewenangan lebih agar terbentuk keoptimalan dalam kinerja pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam "Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014".

"Pengaruh Ketaatan peraturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"; Suatu tindakan dengan menjalankan dan melaksanakan peraturan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diberlakukan secara nasional disebut dengan sikap taat terhadap peraturan undang-undang. Kemudian prosedur tata laksana APIP disesuaikan dengan sistem yang ada, dimana mampu memberikan jaminan atas konsistensi pengelolaan sumber daya sesuai dengan aturan undang-undang, seperti yang dijelaskan dalam "Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh (LAN,2003)". Berdasarkan hasil riset (Dariana, 2020) ditemukan adanya "akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang dipengaruhi oleh ketaatan peraturan perundangan". Pernyataan ini selaras dengan hasil riset (Haryani & Julita, 2021) yakni ketercapaian target yang sudah ditetapkan lembaga pemerintahan tergantung sejauh mana individu menjalankan peraturan undang-undang yang berlaku dengan taat.

## **H<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Teori *stewardship*, yang menjelaskan tentang penata layanan yang baik dipemerintahan. Kepala instansi selaku steward memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya dari rakyat (*principal*) harus memiliki kemampuan melayani masyarakat dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil.

## **H<sub>2</sub> : Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Peran APIP yang semakin independen dalam melaksanakan tugas evaluasi kinerja dan pengawasan lainnya dan APIP memberikan jaminan atas pelaksanaan tugas instansi/organisasi

pemerintah. Selain itu juga APIP memberikan arahan perbaikan bila ditemukan hal-hal yang menyimpang pada instansi/organisasi pemerintah. Sehingga peran APIP terhadap penerapan SAKIP pada instansi/organisasi pemerintah pada umumnya berjalan dengan baik sesuai pedoman dan regulasi yang telah dikeluarkan. Peran APIP memberi nilai tambah kepada organisasi sebagai sumber yang objektif melalui saran-saran yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi.

### **H<sub>3</sub> : Ketaatan peraturan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Mengacu pada bidang administrasi pemerintah, telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. (Jensen & Meckling, 1976). *Agency Teory* Menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah selaku agent telah menjalankan dan mempertanggungjawabkan semua sumber daya dan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah primer. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer. Pelaksanaan riset ini bersasarkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pekanbaru sehingga lokasi yang dijadikan riset yakni lembaga pemerintahan kota Pekanbaru. Teknik pemilihan data sampel menerapkan purposive sampling untuk memilih subjek riset dari sekumpulan subjek dalam populasi yakni pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan kota Pekanbaru dan dari penerapan metode tersebut diperoleh 45 OPD yang dijadikan data sampel termasuk kantor, badan, dinas, inspektorat maupun sekretaris. Maksud dari hal tersebut yaitu supaya mendapatkan data yang lebih akurat karena ke-45 ODP mempunyai peranan penting dalam merencanakan maupun mengendaikan anggaran pemerintahan yang berpengaruh terhadap tingkat kinerja aparat lembaga pemerintahan kota Pekanbaru. Selanjutnya akan di ambil 3 responden dari 45 ODP dengan kriteria responden yaitu "Pegawai yang menduduki jabatan Kepala Dinas/Badan/Instansi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan dan/atau memiliki keterlibatan dengan pelaporan, pelaksanaan, dan penyusunan anggaran" sehingga menjadi 135 responden. Sumber data yang diimplementasikan dalam riset berjenis data primer yang diperoleh dari penyebaran data kuesioner kepada responden. Data yang dikumpulkan dari kuesioner berkaitan dengan pendapat responden lembaga pemerintahan kota Pekanbaru. Kemudian riset yang dilaksanakan ini berjenis kuantitatif. Selain melalui kuesioner peneliti memperoleh data dari metode dokumentasi. Lalu untuk menganalisis data kuantitatif yang sudah diperoleh menerapkan metode analisis regresi linier berganda. Data kuantitatif ini berbentuk data angka dan untuk memudahkan perhitungan dapat memanfaatkan software SPSS versi 26. Terdapat beberapa model pengujian yang dilakukan diantaranya pengujian statistik deskriptif, pengujian kualitas data (uji validitas dan reabilitas), pengujian asumsi klasik (uji heteroskedastisitas, multikolerasi, dan normalitas), dan pengujian hipotesis (uji koefisien determinasi, uji-t, dan uji-F).

## Hasil dan Pembahasan

### Deskriptif Statistik

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKIP	135	34	50	41.90	3.632
KSDM	135	35	54	44.32	3.916
APIP	135	44	67	55.21	4.702
KP	135	19	30	24.71	2.796
Valid N (listwise)	135				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan sajian data tersebut, jumlah data setiap variabel KP, APIP, KSDM, dan AKIP masing-masing sebanyak 135 data. Kemudian nilai standar deviasi, mean, maksimum dan minimumnya untuk variabel KP secara berurutan yakni senilai 2,796; 24,71; 30; dan 19. Pada variabel APIP untuk nilai standar deviasi, mean, maksimum dan minimumnya yakni senilai 4,702; 55,21; 67; dan 44. Lalu nilai standar deviasi, mean, maksimum dan minimumnya untuk variabel KSDM secara berurutan yakni senilai 3,916; 44,32; 54; dan 35. Pada variabel AKIP untuk nilai standar deviasi, mean, maksimum dan minimumnya yakni senilai 3,632; 41,90; 50; dan 34.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas Data

Pengujian ini bertujuan mengetahui tingkat kevalidan instrumen yang diimplementasikan dalam riset. Pada pengujian validitas nilai sig. yang ditetapkan yakni 0,05 (5%) dengan nilai N sebesar 54 dan df nya 132 ( $N - 2 = 135 - 2$ ), sehingga nilai r tabel-nya yakni 0,169.

Tabel 2. Uji Validitas Data

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
AKIP	Y_1	0,541	0,169	Valid
	Y_2	0,677	0,169	Valid
	Y_3	0,594	0,169	Valid
	Y_4	0,600	0,169	Valid
	Y_5	0,677	0,169	Valid
	Y_6	0,594	0,169	Valid
	Y_7	0,627	0,169	Valid
	Y_8	0,633	0,169	Valid
	Y_9	0,496	0,169	Valid
	Y_10	0,473	0,169	Valid
KSDM	X1_1	0,463	0,169	Valid
	X1_2	0,482	0,169	Valid
	X1_3	0,543	0,169	Valid
	X1_4	0,522	0,169	Valid
	X1_5	0,495	0,169	Valid
	X1_6	0,640	0,169	Valid
	X1_7	0,689	0,169	Valid
	X1_8	0,702	0,169	Valid
	X1_9	0,757	0,169	Valid

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
PERAN APIP	X1_10	0,373	0,169	Valid
	X1_11	0,234	0,169	Valid
	X2_1	0,525	0,169	Valid
	X2_2	0,599	0,169	Valid
	X2_3	0,563	0,169	Valid
	X2_4	0,599	0,169	Valid
	X2_5	0,655	0,169	Valid
	X2_6	0,560	0,169	Valid
	X2_7	0,646	0,169	Valid
	X2_8	0,592	0,169	Valid
	X2_9	0,582	0,169	Valid
	X2_10	0,688	0,169	Valid
	X2_11	0,364	0,169	Valid
	X2_12	0,305	0,169	Valid
X2_13	0,364	0,169	Valid	
X2_14	0,332	0,169	Valid	
KP	X3_1	0,704	0,169	Valid
	X3_2	0,767	0,169	Valid
	X3_3	0,779	0,169	Valid
	X3_4	0,742	0,169	Valid
	X3_5	0,784	0,169	Valid
	X3_6	0,770	0,169	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

### Uji Reabilitas Data

Reabilitas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat konsistensi suatu instrumen pengukur dalam mengukur fenomena yang sama. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak, dengan menetapkan nilai batasnya yakni 0,60. Jika instrumen riset mempunyai nilai "Cronbach alpha" melebihi 0,60 yakni 0,80 artinya sangat reliabel dan 0,70 artinya reliabel dan sebaliknya jika nilai "Cronbach alpha" tidak mencapai 0,60 artinya instrumen tidak reliabel.

**Tabel 3.** Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
AKIP	0,792	0,60	Reliabel
KSDM	0,752	0,60	Reliabel
PERAN APIP	0,791	0,60	Reliabel
KP	0,850	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis ada dan tidaknya data yang terdistribusi normal. Indikasi yang digunakan dalam pengujian ini yakni data yang terdistribusi normal memiliki nilai sig. melebihi 0,05 dan begitupun sebaliknya pada data yang tidak terdistribusi normal berarti nilai sig. tidak lebih dari 0,05.

**Tabel 4.** One Sample Kolomogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		135
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.01880928
	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.036
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.087 <sup>c</sup>

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan pengujian normalitas dari 135 data yang digunakan diperoleh nilai sig.nya melebihi 0,05 yakni 0,087, artinya data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Tujuannya untuk menganalisis ada tidaknya korelasi diantara independent variable yang terlibat dalam riset. Indikasi yang digunakan dalam pengujian ini yakni nilai "tolerance value" yang tidak kurang dari 0,10 dan nilai VIF ("Variance Inflation Factor") tidak lebih dari 10 berarti data terbebas dari multikolinieritas dan begitupun sebaliknya.

**Tabel 5.** Uji Multikolinieritas

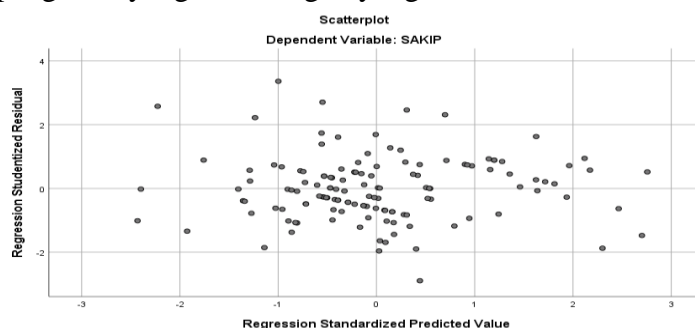
Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
KSDMX <sub>1</sub> )	0,444	2,255
APIP(X <sub>2</sub> )	0,415	2,408
KP (X <sub>3</sub> )	0,794	1,260

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Menurut data hasil uji dalam Tabel 5 diperoleh nilai setiap independent variable yang diimplementasikan dalam riset mempunyai nilai tolerance value yang tidak kurang dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10 berarti data terbebas dari multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Tujuannya menganalisis kemungkinan adanya variance residual yang tidak sama diantara pengamat yang satu dengan yang lain



**Gambar 1.** Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan diagram scatterplot diperoleh penyebaran data yang acak baik dibagian sumbu Y maupun di bawah angka 0 tanpa adanya pembentukan pola. Sehingga data terbebas dari heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 6.** Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	21.147	3.413		6.196	.000
KSDM	-.270	.101	-.291	-2.672	.009
APIP	.430	.087	.556	4.937	.000
KP	.364	.106	.280	3.441	.001

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Nilai setiap variabel yang direpresentasikan dalam Tabel 6 kemudian disubstitusikan kedalam persamaan regresi linier berganda, menjadi :

$$Y = 21,147 + (-0,270) X_1 + 0,430 X_2 + 0,364 X_3$$

- Nilai konstanta sebesar 21,147 menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas diasumsikan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 21,147.
- Nilai koefisien KSDM ( $\beta_1$ ) sebesar -0,270. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satu satuan KSDM maka AKIP akan mengalami penurunan sebesar 0,270 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien APIP ( $\beta_2$ ) sebesar 0,430. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satu satuan APIP maka AKIP akan mengalami peningkatan sebesar 0,430 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien KP ( $\beta_3$ ) sebesar 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan satu satuan KP maka AKIP akan mengalami peningkatan sebesar 0,364 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary <sup>b</sup>		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	DW
1	.556 <sup>a</sup>	.309	.293	3.053	1.649

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Berdasarkan sajian data tersebut diperoleh nilai Adjusted R Square sejumlah 0,293 artinya AKIP berhasil dijelaskan oleh KP, KSDM, dan APIP dalam tingkat 29,3% dan 70,7% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 8.** Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Independen	t tabel	t hitung	Sig	Hasil
KSDM	1,984	2.672	0.009	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Pada uji-t pertama digunakan untuk menganalisis korelasi diantara AKIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dengan KSDM (Kompetensi Sumber Daya Manusia) dan diperoleh nilai sig. tidak melebihi 0,05 yakni 0,009 dan nilai t tabel tidak lebih dari t hitung (1,984 < 2,672) sehingga  $H_0$  diterima berarti AKIP seluruh OPD kota Pekanbaru dipengaruhi dengan signifikansi oleh KSDM.

Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan membutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Fenomena sekarang banyak kita lihat bahwa suatu maju atau tidaknya kinerja suatu organisasi di liat dari kompetensi yang dimiliki individu yang ada di dalamnya. Hal ini akan mendukung penguatan manajemen pemerintah berbasis kinerja. Oleh sebab itu pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksana teknis kegiatan harus mengutamakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabatnya guna mengisi bidang-bidang kegiatan yang sesuai. Pernyataan ini selaras dengan hasil riset (Ekasari, 2017) yakni kinerja lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh kompetensi SDM-nya.

### Pengaruh Peran APIP Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 9.** Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel Independen	t tabel	t hitung	Sig	Hasil
APIP	1,984	4.937	0.000	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Pada uji-t kedua digunakan untuk menganalisis korelasi diantara AKIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dengan APIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan diperoleh nilai sig. tidak melebihi 0,05 yakni 0,000 dan nilai t tabel tidak lebih dari t hitung (1,984 < 4,937) sehingga  $H_0$  diterima berarti AKIP seluruh OPD kota Pekanbaru dipengaruhi dengan signifikansi oleh APIP.

AKIP yang optimal dapat terbentuk seiring dengan peningkatan kinerja APIP dalam membina dan mengawasi setiap program pemerintahan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Rohman (2017) kemaksimalan kinerja inspektor dalam membina maupun mengawasi pelayanan publik akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintahan daerah. Sehingga keefektifan dalam mengawasi AKIP akan lebih optimal jika APIP mempunyai kapabilitas yang tinggi dan hal inilah yang akan memudahkan ketercapaian tujuan yang dikehendaki masyarakat maupun publik. Pernyataan ini selaras dengan hasil riset (Nanda et al., 2019), (Umaira & Adnan, 2019), (Ratna, 2016) yakni AKIP dipengaruhi oleh APIP.

### Pengaruh Ketaatan Peraturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Tabel 20.** Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel Independen	t tabel	t hitung	Sig	Hasil
APIP	1,984	3.441	0.000	Diterima

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Pada uji-t ketiga digunakan untuk menganalisis korelasi diantara AKIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dengan KP (Ketaatan Peraturan) dan diperoleh nilai sig. tidak melebihi 0,05 yakni 0,000 dan nilai t tabel tidak lebih dari t hitung (1,984 < 3,441) sehingga  $H_0$  diterima berarti AKIP seluruh OPD kota Pekanbaru dipengaruhi dengan signifikansi oleh KPMengacu pada bidang administrasi pemerintah, telah dihasilkan pula peraturan perundangan,

berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan dalam kerjanya melalui LAKIP dapat tercapai jika setiap pegawai baik manajer maupun aparat yang terlibat mentaati peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan AKIP dipengaruhi oleh ketaatan pegawainya terhadap peraturan undang-undang. Setiap aparat pemerintah dituntut untuk mentaati setiap peraturan yang berlaku dalam menjalankan setiap kerjanya. Pernyataan ini selaras dengan hasil riset (Dariana, 2020) yakni tingkat AKIP dipengaruhi oleh KP dan hasil riset (Haryani, 2021) juga mendukung riset yang dilakukan bahwa kelancaran program yang dilaksanakan lembaga pemerintahan didorong dari tingkat ketaatan pegawai dalam menjalankan peraturan perundangan. Hal inilah yang bisa mengoptimalkan ketercapaian target.

## Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dalam pelaksanaan riset ini yakni sistem AKIP dipengaruhi oleh KSDM, dan adanya peranan APIP yang mempengaruhi sistem AKIP. Disamping itu, sistem AKIP juga dipengaruhi oleh KP. Keterbatasan yang dialami selama penelitian yakni: penyerahan kuesioner kepada responden melalui perantara dan tidak adanya pendampingan dari peneliti selama pengisian kuesioner. Faktor pemicunya yakni responden sedang sibuk dan adanya peraturan kantor pembatasan aktivitas dari pihak luar. Kemudian pendapat yang disampaikan responden melalui kuesioner tidak seluruhnya disampaikan ada beberapa fakta yang memang sengaja disembunyikan. Hal ini mungkin disebabkan rasa takut jika mengatakan secara jujur. Selain itu, juga ditemukan beragam persepsi dari responden. Peneliti kesulitan dalam pengambilan data dikarenakan kantor OPD kota Pekanbaru tidak dalam satu Kawasan sehingga pengambilan datanya memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil riset ini, saran untuk kedepannya: Pihak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) perlu meningkatkan kompetensi SDM-nya untuk mengoptimalkan AKIP. Hal ini disebabkan tingkat akuntabilitas lembaga pemerintahan Pekanbaru dipengaruhi oleh kompetensi SDM secara signifikan. Selain itu, diperlukan ketaatan pihak pegawai.

## Daftar Pustaka

- Arifianti, H., Payamta, & Sutaryo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Satuan Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 124-139.
- Ekasari Sugiarti, I. Y. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (SNAB)(pp. 580-590). Bandung: Universitas Widyatama.
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Haryani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Studi Pada Pemerintah Kota. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93. <https://pekanbaru.tribunnews.com>
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, *Journal of Finance Economic* 3:305-360,
- Mikesell, J. (2007). Changing state fiscal capacity and tax effort in an era of devolving government, 1981–2003. *Publius: The Journal of Federalism*, 37(4), 532-550.
- Mubaraq, H. (2017). *Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi)*. 1–19.
- Nanda, N. F., Rasuli, M., & Taufik, T. (2019). *Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau)*. 27(3), 254–266. <http://je.ejournal.unri.ac.id/>.
- Negara, L. A. (2003). Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jakarta: Diterbitkan oleh LAN*.
- PP-RI. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- Ratna I, Nasrah H. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19(1): 56-79.
- Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Rohman, A. (2017). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1).
- Soleman, R. (2007). *Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. . Unpad.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3).
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat